

Mempropagandakan Kemerdekaan di Eropa: Perhimpunan Indonesia dan Internasionalisasi Gerakan Antikolonial di Paris

Wildan Sena Utama

Universitas Gadjah Mada
wildansena@gmail.com

Abstract

Artikel ini mengulas tentang aktivitas politik Perhimpunan Indonesia di Paris yang membuka jalan bagi organisasi ini memperluas jaringan internasionalnya dalam rangka mempropagandakan kemerdekaan Indonesia di Eropa. Dikenal sebagai kota kosmopolitan tempat berbagai pergerakan antiimperialisme dan antikolonialisme kulit berwarna tumbuh, Paris menawarkan daya tarik bagi Perhimpunan Indonesia untuk membangun kontak dan jaringan politik internasional dengan aktivis atau kelompok yang memiliki orientasi serupa. Di masa *interwar* ibukota imperial seperti Paris menjadi arena yang penting bagi pertumbuhan dan pembangunan kontak dan jaringan gerakan antikolonialisme negeri jajahan daripada kota-kota di koloni. Artikel ini berpendapat bahwa tanpa koneksi dengan organisasi antikolonial di Paris, mustahil Perhimpunan Indonesia dapat membangun kontak dan mengembangkan jaringannya dengan tokoh-tokoh dan organisasi antikolonial lainnya melalui berbagai pertemuan dan keterlibatan dalam organisasi internasional.

Keywords: Perhimpunan Indonesia, Paris, Antikolonialisme, Jaringan Internasional, Propaganda Kemerdekaan

Pengantar

Artikel ini mengeksplorasi aktivitas politik Perhimpunan Indonesia (PI) dalam memperluas jaringan internasional untuk mempropagandakan kemerdekaan Indonesia di Eropa. Dalam artikel ini pembahasan dititikberatkan pada peran kota Paris sebagai jembatan penghubung propaganda antikolonial PI dengan gerakan antikolonialisme internasional yang memiliki orientasi serupa. Paris adalah kota kosmopolitan tempat di mana bibit pergerakan antiimperialisme dan antikolonialisme kulit berwarna tumbuh subur (Goebel, 2015). Di kota yang disebut oleh Roger Baldwin sebagai “*the capital of the men without country*” inilah berbagai macam gerakan antiimperialis dan antikolonial dari Asia, Afrika, Amerika Latin dan Karibia membangun aktivitas politik, menciptakan jaringan dan aliansi, serta menyebarkan kritiknya terhadap imperialisme Eropa.

Pentingnya Paris sebagai *space* kegiatan politik PI telah dibahas oleh Ingleson (1983, 1993), Poeze (2008), dan Nalenan (1981). Namun, mereka tidak membahas secara mendalam bagaimana “ibukota antiimperialisme” tersebut menjadi kota yang penting dalam perkembangan gerakan antikolonial Indonesia. Baru-baru ini muncul sebuah disertasi doktoral dari University of Amsterdam ditulis oleh Klaas Stutje (2016) yang membahas mengenai aktivitas antikolonialisme PI di Eropa. Dalam disertasi tersebut dengan jeli Stutje memetakan aktivitas politik para pemimpin PI di kota-kota di Eropa dan bagaimana aktivitas itu memperluas jaringan internasional PI dengan organisasi antikolonial lainnya di Eropa. Disertasi yang ditulis oleh Stutje mendorong penulis untuk melihat kembali peran Paris sebagai pembuka jalan propaganda internasional PI di Eropa dan sejauh mana dampak politiknya bagi pemerintah Belanda. Tanpa koneksi dengan organisasi antikolonial di Paris, mustahil PI dapat membangun kontak dan mengembangkan jaringannya dengan tokoh-tokoh dan organisasi antikolonial lainnya melalui pertemuan internasional, seperti Congrès Démocratique International pour la Paix di Bierville dan Congress Against Colonial Oppression and Imperialism di Brussels.

Artikel ini menunjukkan bahwa di masa *interwar* ibukota imperial seperti Paris justru menjadi arena yang penting bagi pertumbuhan dan pembangunan kontak dan jaringan gerakan antikolonialisme negeri jajahan, seperti Indonesia. Di ibukota imperium Eropa ini, atmosfer yang lebih toleran menyebabkan gerakan antikolonial dunia jajahan jauh lebih mampu berkembang daripada di kota-kota koloni (Brückenhuis, 2017: 3). Hal ini memungkinkan para aktivis antikolonial dapat relatif lebih mudah dalam mengorganisasikan gerakan dan membangun jaringan politiknya. Selain itu, pembangunan jaringan antikolonial internasional yang dilakukan oleh PI menunjukkan bahwa mimpi dan tujuan dari pergerakan rakyat terjajah tidak pernah sepenuhnya dibatasi secara kaku oleh perbatasan negara kolonial (Bose, 2006). Antikolonialisme sebagai ideologi memang tertambat pada ide mengenai tanah air, namun menariknya ideologi ini malahan diperkuat oleh afiliasi ekstrateritorial (Stolte dan Tiné, 2012: 67). Dengan melihat aktivitas dan jaringan politik PI di Eropa, artikel ini ingin mendukung tesis Alan Lester bahwa “subjek terjajah dapat dan mampu menempa jaringan perlawanan antikolonial baru yang membentang luas sama seperti *imperial space*” (Stutje, 2013: 153).

Pergerakan Mahasiswa Indonesia di Belanda

Sejak akhir abad ke-19 Belanda menjadi salah satu tujuan utama dari pelajar Indonesia untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Pada awalnya, sebelum Perang Dunia I, mayoritas orang Indonesia yang datang ke Belanda adalah putra raja-raja berada dan putra kaum bangsawan

Jawa (Poeze, 2008: 58). Mereka dikirimkan oleh orang tua mereka ke Belanda untuk memperkuat bahasa Belanda, mempelajari pengetahuan umum, dan mendapatkan orientasi mengenai negeri Belanda (Poeze, 2008: 58). Menurut Stutje (2015: 200), karena tidak mampu untuk mempertahankan cara hidup tradisional, banyak dari keluarga yang berlatar belakang aristokrat ini memilih untuk beradaptasi dengan sistem kekuasaan baru dan mengirimkan anaknya ke Eropa untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Di samping itu tidak tersedianya akses perguruan tinggi di koloni sampai tahun 1920 mendorong para raja-raja dan bangsawan tinggi mengirimkan anak mereka ke Eropa (Van Niel, 1984: 289; Ingleson, 1983: 1).¹ Di tahun 1907, jumlah dari pelajar Indonesia yang studi di Belanda sudah mencapai dua puluh orang. Mereka tersebar di berbagai universitas terbaik di Belanda sesuai dengan bidang-bidang yang dipelajari.

Pada 1908, beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama *Indische Vereeniging (IV)*. Tujuan didirikan organisasi ini, menurut Noto Soeroto dalam tulisannya di *Bendera Wolanda* tahun 1909, adalah untuk “memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda” (Poeze, 2008: 68). Sebagian usul untuk membentuk perhimpunan yang akan didirikan ini menjadi cabang dari Boedi Oetomo (BO) ditolak, terutama oleh dokter Apituly dari Ambon. Penolakan ini memperlihatkan bahwa ada suatu rasa kesamaan asal di antara mahasiswa bahwa mereka adalah “saudara sebangsa”, karena perkumpulan yang dibentuk hendaknya tidak hanya beranggotakan orang Jawa saja tetapi semua suku di Hindia Belanda (Elson, 2009: 32; Poeze, 2008: 68). Untuk mencapai tujuan dasar dari IV, menurut Noto Soeroto, perhimpunan akan memperkuat pergaulan antara orang Hindia di Belanda dan mendorong orang Hindia agar lebih banyak lagi menimba ilmu ke negeri Belanda.

Dibandingkan BO, IV telah pelan-pelan menyusun konsep yang lebih modern mengenai “identitas luas Hindia sebagai satu negara” dan “penduduknya sebagai satu bangsa di atas pengelompokan suku yang menyusunnya” (Elson, 2009: 32). Meskipun demikian, IV tetap membangun kontak dengan BO, serta menjalin komunikasi dengan orang-orang Belanda terkemuka yang mempunyai perhatian kepada Hindia, seperti Abendanon, Snouck Hugronje, van Deventer, dan van Heutsz. IV mengambil sikap lunak, pasif, dan taat kepada pemerintah. Dengan pendirian sikap seperti ini, sejumlah cukup besar orang Belanda bersedia untuk menjadi donatur perhimpunan ini (Poeze, 2008: 75). Ketika Noto Soeroto menjadi ketua IV menggantikan Hoesein Djajadiningrat, ia menekankan agar IV mengambil peran dalam memimpin pembangunan kehidupan di Hindia. Di bawah kendalinya IV menerbitkan seri *Voordrachten en Mededeelingen* (Ceramah dan Informasi). Dalam serial terbitan ini, buku pertama yang dikeluarkan adalah pidato Noto Soeroto yang disampaikan pada 24 Desember 1911, berjudul *Buah Pikiran Raden Adjeng Kartini Sebagai Pedoman Perhimpunan Hindia*. Noto Soeroto menyatakan bahwa ia merasakan kesamaan pandangan dengan Kartini untuk memperjuangkan “penyatuan harmonis unsur peradaban Timur dan Barat” (Poeze, 2008: 78). Dilandasi oleh pandangan politik yang dipengaruhi oleh kebijaksanaan Timur yang tenteram dan damai, Noto Soeroto menginginkan dibangunnya gagasan nasionalisme yang tidak egoistik, yang mengerti pentingnya kooperasi dengan Barat demi membangun Hindia Belanda yang lebih baik (Fakih, 2012: 431).

Seiring meningkatnya jumlah mahasiswa Indonesia di Belanda, keanggotaan IV juga semakin membesar. Dari akhir 1912 sampai dengan akhir 1913 jumlah anggota IV naik dari 39 orang menjadi 47 orang (Poeze, 2008: 80). Di akhir 1913 satu situasi yang cukup penting

¹ Pada 1920 Technische Hogeschool (Institut Teknologi) didirikan di Bandung. Setelah itu, di tahun 1924 Rechts Hogeschool (Sekolah Hukum) didirikan, diikuti oleh pendirian Geneeskundige Hogeschool (Sekolah Kedokteran) di tahun 1927 dan Literaire Faculteit (Fakultas Sastra) di tahun 1940, seluruhnya didirikan di Batavia.

mempengaruhi visi sosial-politik IV untuk tahun-tahun ke depan, yaitu kedatangan tiga eksil politik dari Indische Partij (IP): Douwes Dekker, Soewardi Soerjaningrat, dan Tjiptomangoenkoesomo ke Belanda. Mereka bertiga dibuang oleh pemerintah Belanda karena dianggap memancing keonaran di Hindia Belanda. Kedatangan triumvirat IP ini menimbulkan gejolak di dalam tubuh IV. Pandangan politik antara para punggawa IP dan tokoh IV, seperti Noto Soeroto, yang bertolak belakang menimbulkan konfrontasi langsung di antara kedua belah pihak. Ingleson (1993:2) menyatakan bahwa “bersama dengan kedatangan ketiga pemimpin IP ke negeri Belanda, masuk pula konsep *Indie los van Nederland* (Hindia bebas dari Belanda) dan sebuah negara Hindia yang berdaulat diperintah oleh rakyatnya sendiri”. Sementara itu Noto Soeroto berkilah bahwa IP adalah “partai yang anti-Belanda-nasional”, yang mengandung segala benih perpecahan dan keresahan yang berbahaya, sedangkan IV adalah “perhimpunan yang loyal dengan pemerintah kolonial”, yang berusaha menjalankan politik asosiasi menjalankan kerjasama dengan “penjajah” (Poeze, 2008: 93). Mendirikan suatu Hindia yang merdeka penuh seperti tujuan dari IP, menurut Noto Soeroto, “belum matang satu abad lagi”.

Setelah berakhirnya Perang Dunia I, gelombang baru kedatangan pelajar Indonesia ke Belanda tidak didominasi oleh keluarga kerajaan Jawa. Para orangtua yang berlatar belakang birokrat dan kelas menengah atas mulai mengirim anak-anaknya belajar ke Belanda (Stutje, 2015: 200). Ingleson (1993: 3) mencatat hal ini dimungkinkan berkat kebijakan politis etis yang memperluas akses terhadap keluarga menengah atas untuk mengecap pendidikan dasar dan menengah berbahasa Belanda. Sementara itu, Poeze (2008: 155) memberi alasan yang lebih spesifik bahwa peningkatan jumlah mahasiswa disebabkan kemudahan akses bagi lulusan pendidikan Stovia dan Rechtsschool untuk melanjutkan pendidikan ke Belanda tanpa harus menempuh ujian masuk serta tersedianya banyak beasiswa pendidikan dengan syarat sesusah menyelesaikan pendidikan kedokteran atau hukum bekerja pada pemerintah Belanda beberapa tahun lamanya. Meskipun proporsi mahasiswa yang berasal dari Jawa tetap tinggi, jumlah pelajar dari Minahasa, Ambon, Minangkabau, dan non-Jawa lainnya mulai tumbuh. Di antara kelompok ini terdapat Moh. Hatta yang keluarganya berlatar belakang pedagang kaya dan ulama, Ali Sastroamidjojo, Soetan Sjahrir, dan Achmad Soebardjo yang keluarganya berlatar belakang pejabat birokrat rendah, Darmawan Mangoenkoesomo berasal dari keluarga kepala sekolah, dan Arnold Mononutu yang merupakan anak seorang dokter (Stutje, 2016: 34). Jumlah pelajar Indonesia setelah Perang Dunia I meningkat drastis, dari hanya berjumlah 50 menjelang meletusnya Perang Dunia I menjadi 115 di tahun 1922, 130 di tahun 1924, sampai mencapai 150 orang di tahun 1930 (Poeze, 2008: 221). Namun, selama Depresi Ekonomi jumlah pelajar Indonesia menurun. Di tahun 1936 jumlah orang Indonesia yang belajar di Belanda hanya sekitar 100 orang, meskipun jumlah ini berangsur naik kembali, seiring membaiknya situasi ekonomi, menjadi 140-150 orang (Poeze, 2008: 285).

Di antara generasi baru yang datang setelah Perang Dunia I ini banyak yang telah memiliki kesadaran politik yang jauh lebih tinggi dari generasi mahasiswa sebelumnya (Ingleson, 1993: 3). Mereka umumnya telah memiliki pengalaman politik berkat keterlibatannya dalam organisasi pemuda ketika masih berada di Indonesia (Van Niel, 1984: 290). Para pemuda “melek politik” generasi baru ini memberikan corak antikolonial yang kuat terhadap IV, dan kesadaran politik itu nantinya yang mendasari peberubahan nama Indische Vereeniging menjadi Indonesische Vereeniging di tahun 1922 dan Perhimpunan Indonesia di tahun 1925. Generasi Hatta dan kawan-kawannya ini pada umumnya mempelajari sejarah pergerakan politik di tanah air. Tidak hanya itu, mereka juga mengikuti perkembangan politik global dan terpengaruh dengan ide-ide yang sedang bergema di Barat. Para pemuda ini terpengaruh dengan ide *self-determination* dari Woodrow Wilson. Namun, mereka kecewa dengan kegagalan ide Wilsonian yang tidak berpihak

pada rakyat di dunia jajahan (Van Niel, 1984: 291). Pemikiran Marxisme-Leninisme, yang sedang naik daun baik di Eropa maupun di tanah air, nyatanya paling memikat mayoritas pemuda ini. Moh. Hatta, Gatot Mangkupraja, Iwa Koesoema Soemantri, dan Soebardjo amat terpengaruh dengan ide Marxisme-Leninisme. Selain itu, mahasiswa yang tergabung dalam PI ini juga berhubungan dengan tokoh komunis Indonesia yang *mobile* di Eropa, seperti Semaun, Darsono, dan Tan Malaka. Pemikiran Marxisme-Leninisme mempunyai daya tarik pada penjelasannya yang tajam tentang situasi penjajahan dan filsafat determinisme historisnya (Ingleson, 1983: 7). Namun, meskipun para pemimpin PI memiliki orientasi Marxisme yang kuat, sedikit sekali yang menjadi pendoktrin ajaran Marxisme (Kahin, 2013: 122) dan sedikit sekali yang melakukan analisa kelas dalam masyarakat Indonesia (Ingleson, 1983: 7). Mereka sebagai gantinya lebih tertarik dengan analisis perjuangan ras, antara orang Indonesia berkulit coklat melawan orang Belanda yang berkulit putih, antara bangsa Asia melawan Eropa, atau kemudian dikenal sebagai perjuangan “sini” lawan “sana” (Ingleson, 1983: 7).

Para generasi baru mahasiswa Indonesia di Belanda tersebut dengan cepat mendominasi IV. Perubahan mendasar yang menjadi isyarat akan terjadinya perubahan orientasi dalam organisasi itu adalah dengan mengganti nama *Indische Vereeniging* menjadi *Indonesische Vereeniging* di tahun 1922. Nama baru ini menyatakan sebuah sikap yang lebih kuat sebagai orang Indonesia bukan lagi bagian dari Hindia Belanda (Ingleson, 1993: 7). Darmawan Mangoenkoesomo mengatakan bahwa mulai dari sekarang kita “membangun Indonesia dan meniadakan Hindia atau Nederlands-Indie” (Hatta, 2011: 166). Di tahun 1923, menurut Poeze (2008: 174) *Indonesische Vereeniging* secara pasti telah meninggalkan masa lalunya sebagai “perhimpunan untuk bersenang-senang”. Di bawah ketua baru Iwa Koesoema Soemantri organisasi ini mengemukakan tiga asas pokok yang menjadi pegangan tetap bagi *Indonesische* untuk tahun-tahun mendatang: kemerdekaan bagi Indonesia, *self-help*, dan perjuangan ke arah kesatuan (Poeze, 2008: 174). Asas perjuangan yang lebih radikal ini kemudian disalurkan ke dalam media propaganda mereka yang turut diganti namanya dari *Hindia Poetra* menjadi *Indonesia Merdeka*. Dalam pendahuluan edisi perdana *Indonesia Merdeka*, disebutkan bahwa perubahan nama ini mengungkapkan tujuan dan usaha dari organisasi ini, yaitu merdeka! Ditambah lagi kata *Indonesia Merdeka* diharapkan dapat menjadi semboyan yang menarik bagi pemuda Indonesia untuk berjuang mencapai kemerdekaan (Blumberger 1931: 187; Poeze, 2008: 175).

Di bawah kepengurusan Nazir Pamontjak di tahun 1924, dikemukakan bahwa tujuan dari *Indonesische Vereeniging*, kemerdekaan Indonesia, harus dicapai dengan membentuk “*een zelfbewuste, op eigen kracht steunende nationalistische massa-actie*” (massa-aksi nasionalis berdasarkan kesadaran kekuatan diri sendiri). Organisasi ini kemudian menerbitkan buku peringatan organisasi *Gedenkboek Indonesische Vereeniging 1908-1923*. Buku ini berisi tulisan anggota *Indonesische* mengenai sejarah lengkap organisasi dari tahun 1908 sampai 1923 serta penjelasan tentang berbagai aspek program kelompok ini (Ingleson, 1993: 9). Karangan di dalamnya begitu tajam mengupas dan mengecam politik penjajahan (Sastroamidjojo, 1974: 44). Seperti salah satunya dalam artikel yang berjudul “*Driehonderd Jaren Overheersching*” (300 tahun penjajahan) yang menyebutkan bahwa organisasi ini akan berjuang dengan kekuatan sendiri “*geen samenwerking met de overheerscher past ons!*” (tanpa kerjasama dengan penjajah yang tidak sesuai dengan kita!) (Blumberger, 1931: 188). Para pengarang dalam buku peringatan itu tidak dicantumkan namanya. Hanya satu karangan ditaruh nama pengarangnya, “Sakri Sunarto” dalam tulisan berjudul “*Nieuwe Banen*” (Rintisan-Rintisan Baru), yang penulis sebetulnya adalah Soekiman Wirjosandjojo (Sastroamidjojo, 1974: 44; Hatta, 2011: 209). Sampul buku ini bergambar kepala kerbau di tengah bendera merah putih berkibar, menggambarkan simbol dari gerakan nasionalis itu. Terbitnya buku ini mendapatkan kritikan tajam dari pers Belanda.

Menurut Hatta (2011: 209), ada pers Belanda yang mengatakan bahwa “mahasiswa Indonesia sudah dihindangi semangat revolusioner yang susah untuk dikikis”.

Visi Internasional dan Internasionalisasi Jaringan

Di awal tahun 1925 Indonesische Vereeniging mengubah namanya, menggunakan terjemahan Melayu, menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Di bawah kepemimpinan ketua baru Soekiman Wirjosandjojo diputuskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia yang berusaha dicapai lewat strategi solidaritas, swadaya, dan nonkooperasi, tidak hanya perlu memperhatikan aspek “kesatuan nasional” tetapi juga “kesetiakawanan internasional”. Dalam program kepemimpinan baru tersebut disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan dari PI maka propaganda asas-asas PI harus lebih intensif di Indonesia, selain itu PI menekankan pentingnya propaganda ke dunia internasional untuk menarik perhatian dunia pada masalah Indonesia dan membangkitkan perhatian anggota PI pada isu-isu internasional melalui ceramah, berpergian ke negara lain, atau perjalanan studi (Blumberger, 1931: 189). Dengan munculnya inisiatif dari internasionalisasi jaringan, menurut Ali Sastroamidjojo (1974: 48), “mencerminkan kesadaran PI bahwa nasionalisme Indonesia tidak berdiri sendiri, faktor internasionalisme disadari sebagai unsur penting di dalam perjuangan kemerdekaan nasional”. Hatta (2001: 314) sementara itu berpendapat bahwa propaganda luar negeri penting bagi gerakan nasionalis Indonesia sebab “dunia luar sampai sekarang tidak tahu tentang apa yang terjadi di tanah air kita, sebagai konsekuensinya secara keliru dipercayai bahwa Indonesia benar-benar mendapat berkah pemerintah Belanda”.

Visi internasional telah terbangun di antara pemimpin PI, dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa dan ide-ide yang berpengaruh secara global bagi dunia jajahan dan juga dari gerakan nasionalisme di negara-negara Asia dan Afrika. Dalam karangan-karangan yang ditulis oleh para punggawa PI di *Gedenkboek*, para mahasiswa Indonesia telah secara konsisten menginterpretasi perjuangan mereka untuk kemerdekaan nasional secara lebih luas, dalam kerangka internasional (Stutje, 2015: 202). Maramis, misalnya, menulis secara panjang dalam artikelnya mengatakan bahwa evolusi PI dari klub sosial menjadi gerakan nasionalis secara inheren berhubungan tidak hanya dengan kebangkitan nasional itu sendiri, tetapi juga “kebangkitan Timur” (Stutje, 2015: 202). Apa yang dimaksud Maramis dengan kebangkitan Timur merujuk kepada kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905, kebangkitan nasional Tiongkok dan India, serta berdirinya Boedi Oetomo dan Indische Vereeniging. Di lain tulisan, Hatta dalam karangannya “Indonesia di Tengah Revolusi Asia” dengan fasih menyinggung pergerakan Asia lainnya, Mustafa Kemal Pasha di Turki dan Mahatma Gandhi di India, yang mempunyai gema yang kuat bagi perjuangan kemerdekaan di tanah air (*Gedenkboek*, 1924: 59-63).

Gerakan nasionalisme Indonesia disadari oleh para pemimpin PI merupakan bagian dari apa yang mereka sebut sebagai *rising tide of color* (pasang naik kulit berwarna). Selain kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 dan munculnya Revolusi Tiongkok tahun 1911, ada dua peristiwa penting yang memberikan pengaruh moral dan politik sangat besar bagi semakin radikalnya gerakan antikolonialisme di dunia jajahan: Revolusi Bolshevik dan “*Wilsonian moment*”. Pecahnya Revolusi Bolshevik tahun 1917 membawa spirit radikalisme luar biasa kepada gerakan antiimperialisme di dunia jajahan untuk melawan kolonialisme dan kapitalisme. Di Hindia Belanda, kabar Revolusi Rusia disambut dengan antusias. Tjiptomangoenkoesoemo menulis bahwa Revolusi Rusia adalah “bukti nasib sebuah pemerintahan yang mengharapakan subjeknya menanggung segala hal”, sedangkan Sneevliet segera menulis artikel berjudul “*Zegepraal*” (Kemenangan) di koran *De Indiër* (Van Dijk, 2007: 548). Dalam artikelnya Sneevliet mengatakan

bahwa rakyat Jawa harus meniru revolusi yang dilakukan rakyat Rusia, yang sama-sama miskin dan buta huruf seperti kita, demi mencapai kemenangan (Van Dijk, 2007: 548). Artikel dari Sneevliet ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Darnakoesoemo di *Pertimbangan*. “Zegepraal” menimbulkan kegemparan di Hindia Belanda begitu disebar oleh media berbahasa Belanda.

Begitu pula yang terjadi dengan ide dari Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat, mengenai penentuan nasib sendiri. Menurut Manela (2007), pesan retorik dari Wilson ini menciptakan apa yang disebut “momen Wilsonian”: suatu efek global gerakan nasionalisme antikolonial di dunia jajahan yang timbul merespons retorika Wilson untuk membentuk pemerintahan sendiri. Tidak hanya di Cina, Korea, Mesir, dan India – yang menjadi objek penelitian Manela – efek Wilsonian ini juga berpengaruh di Indonesia. Di kalangan mahasiswa PI, misalnya, mereka seringkali mengutip pernyataan Wilson untuk tujuan menghimbau Barat agar mereka diberi kesempatan mencapai cita-cita mereka sendiri (Ingleson, 1993: 19). Para mahasiswa terpelajar ini percaya bahwa mereka sedang “berada di ambang fajar zaman baru ketika bangsa Asia mulai menemukan tempatnya di dunia ini” (Ingleson, 1993: 19). Jepang dianggap merupakan pembawa obor dari datangnya “abad Asia” ini. Dengan kemenangannya atas Rusia di tahun 1905 para mahasiswa yakin bahwa adalah sebuah mitos suatu negara Barat tidak dapat dikalahkan oleh negara Timur.

Strategi yang disepakati oleh para pemimpin PI dalam memperluas propaganda gerakan kemerdekaan Indonesia adalah membangun jaringan dengan gerakan antikolonial Asia dan Afrika, terutama yang berada di Eropa. Di samping itu, pengurus PI juga menjaga hubungan dengan organisasi mahasiswa Indonesia dan Malaysia di Kairo (Ingleson, 1993: 45). Upaya untuk membangun koneksi dengan dunia internasional pernah dilakukan sebelumnya oleh anggota PI, yaitu Sam Ratulangi, yang mendirikan organisasi Pan-Asia Société Asiatique des Étudiants di Zurich tahun 1918 bersama dengan mahasiswa dari Cina, Jepang, India, Siam, Filipina, dan Korea. Dalam format yang sama namun kali ini lebih berorientasi politis dan radikal, PI menghubungkan gerakan antikolonial Indonesia dengan organisasi antikolonial Asia dan Afrika. Seperti yang dikatakan oleh Arnold Mononutu, Wakil Ketua PI saat itu, ia mengatakan bahwa “di bawah kepemimpinan Soekiman, mahasiswa Indonesia harus mengadakan kerjasama dengan mahasiswa dari negara lain terutama dari Asia dan Afrika yang statusnya masih sama dengan Indonesia ialah sebagai bangsa terjajah” (Nalenan, 1981: 57).

Usaha yang dilakukan dengan segera adalah mulai mengirim perwakilan PI ke kota-kota di Eropa yang menjadi basis pergerakan antiimperialisme dunia jajahan. Lokasi Belanda yang dekat dengan metropol-metropol di Eropa merupakan suatu kemudahan untuk menjalankan strategi bawah tanah ini. Paris dipilih kemudian sebagai kota utama “pusat gravitasi” dari aktivisme internasional PI (Stutje, 2013: 159). Pilihan ini didasari oleh pertimbangan bahwa Paris merupakan “ibukota” dari aktivitas antiimperialisme dan antikolonialisme yang bergairah di mana para aktivis dari berbagai mancanegara Asia, Afrika, Karibia, dan Amerika Latin tinggal di sana mengorganisir dengan aktif rapat dan pertemuan, menerbitkan majalah pergerakan, serta membangun jaringan antar sesama organisasi dengan minat serupa. Selain itu, pengalaman beberapa anggota PI yang pernah merasakan “atmosfer” antikolonial internasional itu menambah daya tarik Paris sebagai kota tujuan perluasan jaringan.

Mononutu ditunjuk sebagai perwakilan PI untuk mengontak dan membangun hubungan dengan organisasi antikolonial dari dunia jajahan. Ia dipilih karena memiliki kemampuan dasar bahasa Perancis yang baik, punya hubungan luas dengan para diplomat, memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapat, serta dapat bertindak atas nama PI karena posisinya adalah wakil ketua (Nalenan, 1981: 58). Mononutu kemudian menjadi “duta tidak resmi” dari PI di

Paris. Ia menghadapi tugas yang berat untuk membangun jaringan dalam dunia pergerakan yang baru baginya dan ditugaskan untuk memberi laporan selama di Paris.

Anti-Imperial Metropolis

Paris di masa *interwar* disebut oleh Roger Baldwin, penulis Amerika dan pendukung hak asasi manusia, sebagai “*the capital of the men without country*” (Goebel, 2015: 2; Edwards, 2003: 11). Paris adalah kota kosmpolitan tempat beraneka orang kulit berwarna dari mancanegara Asia, Afrika, Karibia, dan Amerika Latin, tinggal sementara dan bertukar pikiran. Mereka mempunyai latar belakang bermacam-macam, mulai dari mahasiswa, pekerja migran, aktivis, pengungsi, eksil, sampai tentara. Diestimasi secara kasar terdapat sekitar 100.000 orang non-Eropa tinggal di Paris tahun 1930. Ibukota Perancis ini mengakomodasi lebih banyak orang-orang dari Dunia Selatan dibandingkan kota kontemporer lainnya di seluruh dunia, kecuali mungkin New York (Goebel, 2015: 10). Selain itu, di tahun 1920-an Paris adalah sedikit kota di Eropa di mana eksil dan pengungsi politik dapat dengan mudah mencari tempat dan tinggal sementara. Berdasarkan sensus di tahun 1931, menurut Kaspi dan Marès, terdapat jumlah sekitar 148.000 orang Italia, 83.000 orang Polandia, 52.000 orang Belgia, 42.000 orang Rusia, dan 150.000 residen dari negara Eropa Barat (Stutje, 2016: 86). Berangkat dari kenyataan ini, maka di tahun 1920-an penempatan *cross-ethnic* dan *cross-regional* lebih besar di Paris dibandingkan tempat manapun (Goebel, 2015: 10).

Pada 1920-an dan 1930-an Paris adalah “*anti-imperial metropolis*” (Goebel, 2015). Di tempat inilah terdapat jangkauan yang luas para penggerak antiimperialisme dan antikolonialisme dari berbagai negara “Dunia Ketiga”: revolusioneris dan aktivis dari Afrika Utara dan koloni Perancis lainnya, sebagian anggota dari Partai Komunis Cina, revolusioneris dari India, dan intelektual dari Amerika Latin dan Karibia. Sejumlah tokoh pergerakan antiimperialisme dan antikolonialisme yang melakukan aktivitas politik di Paris di tahun 1920-an di antaranya adalah Ho Chi Minh (Vietnam), Lamine Senghor (Senegal), Messali Hadj dan Abdelkader Hadj Ali (Aljazair), Zhou Enlai dan Xia Ting (Cina), Habib Bourguiba (Tunisia), M.N. Roy (India), Carlos Quijano (Uruguay), Jean Ralaimongo (Madagaskar), Eudocio Ravine (Peru), Salvador de la Plaza (Venezuela), dan Max Bloncourt (Guadeloupe) (Utama, 2017a). Beberapa tokoh ini tidak membangun gerakan politiknya sendiri-sendiri. Mereka menjalin kontak dan membangun jaringan, meskipun berbeda negara dan organisasi. Contohnya adalah Ho Chi Minh, Abdelkader Hadj Ali, Max Bloncourt, dan Lamine Senghor yang bergabung dalam Intercolonial Union, sebuah organisasi progresif multietnis di bawah Partai Komunis Perancis untuk orang-orang kulit berwarna dari “Dunia Ketiga”.

Elleke Boehmer (2002: 1-2) mengatakan bahwa gerakan antiimperial dan nasionalis menemukan solidaritas inspirasional dan model instruktif dari pengalaman dan kerja “satu sama lain”, tidak hanya antara kontak antara pusat kolonial Eropa dan periferi tetapi juga di antara periferi. Menariknya kontak yang terjadi di antara periferi tersebut terjadi justru di *metropole* seperti Paris. Hal ini dapat terjadi karena iklim politik di *metropole*, seperti Paris, Berlin, dan Brussels, justru lebih toleran dan kondusif daripada kondisi yang ditemui di koloni Eropa di Asia dan Afrika (Brückenhaus, 2017: 3). Sehingga ini memungkinkan para aktivis dan intelektual penggerak antiimperialisme dapat relatif lebih mudah dalam mengorganisasikan gerakan dan membangun jaringan politiknya. Ibukota imperial ini adalah “*colonial space*” di mana momok dari “imperium” menuntun identifikasi diri dari para penduduknya juga interaksi sosial dan politik mereka (Boittin, 2010: xiv). Pada masa *interwar*, ibukota-ibukota imperial inilah justru menjadi

arena yang paling penting dari pertumbuhan dan pembangunan kontak dan jaringan gerakan antikolonialisme Asia dan Afrika.

Para pemimpin PI mengerti dengan baik situasi kosmpolitan dan atmosfer transnasionalisme antikolonial Paris. Beberapa di antara mereka pernah menjalin hubungan dengan para aktivis dari Dunia Ketiga di Paris. Kota ini juga menjadi tempat berlibur para mahasiswa Indonesia. Selain itu, Paris adalah tempat singgah dari mahasiswa Indonesia yang baru datang dari koloni, biasanya sampai di pelabuhan Genoa atau Marseille dan dari sana mengambil jalan darat ke Belanda (Stutje, 2016: 85). Ali Sastroamidjojo, misalnya, menceritakan pengalamannya ketika singgah di Paris, menjemput istrinya dari Genoa.

“Tradisi negeri Perancis dengan ide-ide progresif warisan dari Revolusi Perancis pun masih terasa. Itulah sebabnya Paris menarik banyak kaum pemuda revolusioner dari negeri-negeri yang masih menderita kekejaman kolonialisme. Dalam suasana demikian tidak mengherankan kalau pemuda-pemuda Indonesia, anggota-anggota Perhimpunan Indonesia tertarik juga pada Paris. Tiap-tiap waktu libur tentu mereka pergi ke kota itu ... Sudah sewajarnya bahwa mereka mencari dan mendapat kontak dengan oknum-oknum revolusioner yang berada di sana. Kebanyakan mereka itu datang dari Asia dan Afrika. Sering pertemuan-pertemuan diadakan di tempat penginapan kami di Hotel du Progrès. Tukar menukar pikiran antara pemuda Indonesia dan pemuda Asia-Afrika sangat bermanfaat dan memperkaya perjuangan yang telah hidup di kalangan Perhimpunan Indonesia” (Sastroamidjojo, 1974: 37).

Ali Sastroamidjojo menyebutkan bahwa Hotel du Progrès merupakan salah lokasi penting bagi kehidupan politik mahasiswa Indonesia di Paris. Hotel ini terletak di kawasan universitas Latin Quarter yang merupakan pusat dari aktivitas politik mahasiswa dan aktivis antikolonial dan nasionalis. Sebelum Mononutu tinggal di sana, Sastromoeljono pernah tinggal di sana, begitu pula dengan Nazif, Hatta, dan Pamontjak. Selain du Progrès, hotel lain yang menjadi tempat tinggal dari mahasiswa PI adalah Hotel Soufflot di 9 Rue Toullier. Di sinilah Soebardjo, Soepomo, dan Gatot Taroenomihardjo menginap selama di Paris. Mereka sering mengadakan pertemuan antar sesama mahasiswa Indonesia di kamar yang mereka sewa. Intelijen Perancis dalam sebuah laporannya bahkan menganggap bahwa hotel ini merupakan semacam “kantor politik” dari para mahasiswa Indonesia (Stutje, 2016: 87). Tidak hanya hotel yang menjadi tempat perkumpulan, sebuah bar kecil bernama Taverne Pascal yang berlokasi di 2 Rue École de Medecine adalah tempat yang penting bagi kehidupan sosial dan politik orang Indonesia di Paris. Mononutu dan para mahasiswa Indonesia seringkali mengadakan diskusi di bar ini. Ketika Taverne Pascal berubah menjadi restoran Cina kemudian, mahasiswa Asia masih sering ke lokasi ini untuk berkumpul.

Kawasan Latin Quarter menjadi area yang menarik perhatian mahasiswa Indonesia di Paris karena selain murah dan dekat universitas, daerah ini merupakan episentrum dari pergerakan antikolonial dan nasionalis. Dalam jarak sekitar 300 meter dari Taverne Pascal dan Hotel Soufflot terletak kantor Association Mutuelle des Indochinois, Association des Étudiants Hindous de France, Thai’s People Party, the Association des Étudiants Chinois, dan faksi kiri dari Guomintang Cina (Stutje, 2016: 89). Beberapa dari alamat mereka hanya berupa kantor pos atau beroperasi di bawah kedok restoran Cina. Beberapa tempat pun menjadi lokasi sekaligus dari beberapa organisasi, sehingga memungkinkan terbangunnya kerjasama dan *cross-fertilisation* di antara kelompok politik dan kebangsaan yang berbeda (Stutje, 2016: 89).

Di tengah lingkungan yang kosmopolitan dalam aspek kebangsaan dan pergerakan ini, Mononutu mencari kontak yang dapat membuka jalan kerjasama transnasional bagi gerakan kemerdekaan Indonesia. Tugas yang diemban oleh Mononutu ini tidak mudah. Meskipun para pemimpin PI familiar dengan kosmpolitanisme dan jaringan pergerakan di Paris, organisasi ini

belum mempunyai hubungan yang kuat dengan salah satu organisasi antikolonial di sana. Dalam pembahasan selanjutnya akan dibahas mengenai upaya Mononutu bertemu dengan berbagai organisasi dari mulai yang bertalarbelakang ideologi fasis, komunis, sampai nasionalis. Bagaimana Mononutu membangun jembatan pergerakan kemerdekaan Indonesia dengan gerakan antikolonial di Paris?

Mononutu dan Jaringan Antikolonial di Paris

Mengorbankan studinya di Belanda, Mononutu pergi ke Paris di musim panas tahun 1925. Ia mengatakan kepada orang tua dan pembimbing administratifnya di kampus ingin melanjutkan studinya di Institut d'études politiques. Namun, kenyatannya ia tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa di sana (Stutje, 2013: 161). Di malam pertama Mononutu tinggal di hotel yang berlokasi di 47 Boulevard Saint-Michel, Latin Quarter (Stutje, 2016: 85). Setelah seminggu ia kemudian pindah lokasi beberapa blok di Hotel du Progrès di Rue Gay Lussac, Latin Quarter yang biayanya lebih murah. Di bulan pertama tinggal di Paris, Mononutu menggunakan uang dari orangtuanya di Manado sebesar 300 guilder (Nalenan, 1981: 31). Selain itu, ia menggunakan uang dari “dana nasional” yang dihimpun oleh PI untuk mendanai kegiatan propaganda internasional.

Hal yang pertama kali dilakukan Mononutu di Paris adalah mencari kontak dengan gerakan antikolonial Asia dan Afrika sebagaimana hasil yang disepakati dalam rapat PI. Namun, nyatanya Mononutu tidak spesifik langsung berhubungan dengan organisasi antikolonial lain di Paris. Dalam sebuah laporan Duta Besar Belanda di Perancis disebutkan bahwa Mononutu sering datang ke pertemuan organisasi fasis Faisceau dan kelompok ultra kanan Action Francaise (Stutje, 2016: 89). Terlepas dari adanya fakta menarik tersebut, Mononutu bersemangat dalam membangun kerjasama transnasional dengan organisasi antikolonial lain di Paris. Seperti dalam suratnya kepada Abdulmadjid Djojoadhiningrat, ia mengatakan berhubungan dengan beberapa aktivis dan akademisi yang mempunyai perhatian dengan gerakan antikolonialisme, salah satunya Tristão de Bragança Cunha. Cunha adalah seorang mahasiswa teknik di Sorbonne University yang aktif menulis untuk beberapa majalah India dan juga di majalah Perancis, seperti majalah antimiliterisme kiri *Le Clarté* yang didirikan oleh Henri Barbusse dan majalah berhaluan liberal *L'Europe Nouvelle* milik Louise Weiss. Topik yang ditulis oleh Cunha adalah mengenai kampanye gerakan kemerdekaan India secara umum dan juga pembebasan *enclave* Portugis secara khusus (Stutje, 2016: 89). Dalam salah satu edisi *Indonesia Merdeka*, Cunha pernah menulis, atas permintaan Mononutu, mengenai peran mahasiswa dalam perjuangan kemerdekaan.

Salah satu kelompok progresif yang menarik perhatian Mononutu adalah lingkaran komunis, khususnya aktivis antikolonial di sekitar *Le Paria*, *Tribune des Populations des Colonies*, dan *L'Humanité* (Stutje, 2016: 90). Banyak aktivis antikolonial yang bergabung dalam organisasi *onderbouw* bentukan Parti Communiste Française (Partai Komunis Perancis) di awal abad ke-20 karena partai ini mempunyai perhatian kepada penyatuan gerakan antikolonial di dunia jajahan dengan gerakan komunis Soviet seperti yang dianjurkan oleh Kongres Komintern Kedua tahun 1920. Selain Intercolonial Union (IU) yang menjadi wadah dari advokasi kemerdekaan segera bagi koloni, Partai Komunis Perancis mendirikan satu lembaga penelitian dan pelatihan bernama Comité d' Études Coloniales. Lembaga ini memiliki misi untuk mendokumentasikan dan merefleksikan masalah-masalah kolonialisme sekaligus memproduksi pengetahuan teoritis mengenai komunis internasional dan propaganda di seputar antikolonialisme (Utama, 2014: 172; Aissaoui, 2009: 14).

IU memproduksi koran yang berpengaruh bagi gerakan antikolonial di Paris: *Le Paria*. Koran yang memiliki anak judul “Tribune des Populations des Colonies” (Tribun Penduduk Kolonial)

ini memiliki oplah sebanyak dua ribu eksemplar dan terbit sebanyak satu kali sebulan – ketika pendanaan menjadi semakin sulit koran ini terbit dua kali sebulan (Edwards, 2003: 19). Kedua wadah ini segera meraih popularitas karena di dalamnya berkumpul para aktivis antikolonial yang terkenal, seperti Ho Chi Minh, Abdelkader Hadj Ali, Max Bloncourt, dan Lamine Senghor. *Le Paria* adalah corong utama propaganda melawan imperialisme Perancis, seperti yang mereka perlihatkan saat menentang intervensi militer Perancis di Rif Vvar antara Spanyol dan orang Berber Maroko di daerah pegunungan Rif di tahun 1924 dan Great Syrian Revolt di tahun 1925. Kedua peristiwa ini juga mendapatkan atensi dari *Indonesia Merdeka*, bahkan *Indonesia Merdeka* mempublikasikan tulisan dari Abd el-Krim, pemimpin militer dari Rif. Para pembaca *Le Paria* yang militan dan tertarik pada masalah yang diakibatkan kolonialisme mendorong Mononutu untuk menjalin kontak dengan para punggawa koran itu. Ia berhubungan dengan nasionalis revolusioner Vietnam, Nguyen The Truyen, yang menjadi editor bagi *Le Paria*. Mononutu tidak sempat membangun kontak dengan Ho Chi Minh yang telah meninggalkan Paris di tahun 1923.

Meskipun *Le Paria* mempunyai perhatian mendalam terhadap kekejaman kolonialisme, upaya Mononutu untuk menerbitkan manifesto PI di *Le Paria* tidak berhasil. Salah satu penyebab utamanya adalah di tahun 1925 baik IU dan *Le Paria* telah mengalami konflik internal yang menyebabkan terjadinya kemunduran. Dalam keanggotaan IU terjadi perdebatan di antara para aktivis antikolonial mengenai prioritas dan tugas yang jelas dari Partai Komunis Perancis mengenai koloni. Kekecewaan semakin meningkat di antara figur antikolonial terkenal, seperti Ho Chi Minh dan Lamine Senghor, terhadap respons dari anggota dan para pemimpin Partai Komunis Perancis yang menempatkan “antikapitalisme Barat” di atas “kemerdekaan nasional” di dalam garis perjuangan partai (Stutje, 2016: 92). Banyak pemimpin komunis percaya bahwa revolusi akan mulai dari Barat yang terindustrialisasi dan pergerakan antikolonial harus membantu partai-partai komunis Eropa untuk melemahkan kapitalisme Barat di luar Eropa. Selain itu, meskipun Comité d’ Études Coloniales telah didirikan, para anggota Partai Komunis Perancis masih mendiskusikan kemungkinan munculnya revolusi di koloni dengan penghinaan dan rasisme yang disamakan. Salah satu klaim yang beredar adalah bahwa orang-orang di koloni tidak mampu untuk mengemansipasi dirinya sendiri: mereka tidak mempunyai masa lalu yang revolusioner dan di banyak koloni mereka digunakan sebagai budak dan tampaknya tidak membayangkan kemungkinan untuk bebas dari hal itu (Edwards, 2003: 21).

Jadi, Mononutu datang di saat para editor *Le Paria*, para aktivis antikolonial yang terkenal, mulai ancap-ancah meninggalkan IU dan mendirikan organisasi yang lebih mengedepankan garis geografis. Di tahun 1926, Nguyen The Truyen memulai Parti Annamite de l’ Indépendance, Lamine Senghor mendirikan Comité de Défense de la Race Nègre, sementara Abdelkader Hadj Ali menginisiasi Étoile Nord-Africaine (Stutje, 2016: 93). Mengang pendirian organisasi ini tidak sepenuhnya lepas dari Partai Komunis Perancis atau gerakan komunisme, mereka masih mendapatkan bantuan dana dari partai. Meskipun demikian, perhatian utama organisasi ini lebih mementingkan orientasi politik mereka, yakni kemerdekaan nasional, dan mereka bekerja lebih independen dari arahan partai, serta mulai membangun aliansi dengan aktivis nonkomunis di Perancis.

Meskipun Mononutu tidak berhasil dalam membangun hubungan dengan *Le Paria* atau lingkaran komunis Paris, secercah titik terang muncul ketika Mononutu berhasil membangun hubungan dengan para mahasiswa, aktivis, dan akademisi dari Asia. Pilihan untuk mendirikan jaringan transnasional dengan lingkungan Asia, menurut Stutje (2016), dipengaruhi oleh setidaknya tiga hal: orientasi Pan-Asianis dari PI, latar belakang komposisi dari aktivis Asia yang mayoritas mahasiswa dan akademisi, dan rata-rata lokasi kegiatan dari aktivis ini berpusat di Latin Quarter yang memudahkan Mononutu untuk membangun relasi.

Pembuka Jalan Propaganda Internasional

Organisasi yang menjadi pintu gerbang internasionalisasi pemikiran dan program PI di Paris adalah Association pour l'étude des Civilisations Orientales (AECO). Mononutu adalah anggota dewan dalam organisasi yang didirikan tahun 1925 sebagai kelanjutan dari kolaborasi antiimperialis dengan berbagai latar belakang negara tersebut. Tujuan objektif dari organisasi ini adalah untuk menyatukan mahasiswa dan intelektual dari berbagai koloni di Asia agar mengenal kebudayaannya satu sama lain dan memperkenalkan peradaban Timur yang kaya kepada publik Barat melalui sejarah, seni, dan pertunjukkan kebudayaan (Stutje, 2016: 94). Namun, menurut Hatta (2001: 316), meskipun perhimpunan ini menunjukkan minatnya pada studi budaya Timur, tetapi tidak kurang unsur politik di dalamnya. Inisiatif untuk mendirikan organisasi ini datang dari profesor tamu dari Beijing, Tjeng Yin Chang, dan mahasiswa-pekerja komunis dari Cina, Xia Ting. AECO berhasil menarik minat dari para mahasiswa, aktivis, dan intelektual Asia untuk bergabung dengan organisasi ini. Markas dari organisasi ini menumpang di kantor Association des Étudiants Chinois dan kelompok mahasiswa nasionalis Cina lainnya (Stutje, 2016: 94).

Beberapa anggota organisasi ini yang mempunyai latar belakang komunis, seperti Xia Ting yang merupakan anggota faksi dari Guomindang di Paris, membuat khawatir intelijen Belanda, Inggris, dan Perancis. Organisasi ini diduga menjadi wadah infiltrasi komunisme atau paham subversif kepada mahasiswa dan intelektual Asia. Ketakutan ini tampaknya berlebihan sebab organisasi ini mempunyai pandangan dan ideologi yang luas dan lebih condong kepada karakter akademik dan kultural. Beberapa anggota organisasi ini adalah mahasiswa dan aktivis terkenal dari Asia, seperti K.M. Panikkar (India), Bui Quan Chiêu (Vietnam), Duong Van Giao (Vietnam), Prabodh Chandra Bagchi (India), Alimardan Bey Topchubachev (Azerbaijan), Tung Mo (Cina), dan Prayun Phamonmontri (Thailand).

K.M. Panikkar adalah seorang wartawan dan nasionalis pengikut Gandhi yang bersimpati pada politik nonkooperasinya (Hatta, 2011: 262). Setelah lulus dari Oxford University ia menjadi dosen sejarah di Aligarh University. Selain berkecukupan pada kegiatan akademik, ia adalah jurnalis untuk *Hindustan Times*, organ dari Indian National Congress. Pada Januari 1926 ia tiba di Paris untuk menjadi jurnalis dengan menulis artikel tentang kebudayaan dan politik India untuk media Perancis. Panikkar mempunyai relasi dengan para petinggi dari Indian National Congress. Setelah India merdeka ia menjadi Duta Besar India pertama untuk Cina (Nalenan, 1981: 59). Orang India lainnya, Bagchi, merupakan mahasiswa cemerlang dan pengajar muda di sejarah (kebudayaan) India kuno di University of Calcutta. Atas rekomendasi dari Rabindranath Tagore, Bagchi mengambil studi doktoral di Paris dibimbing oleh Indologis ternama Perancis, Sylvain Lévi (Bayly, 2004: 710). Bagchi adalah salah satu anggota dari Greater India Society dan Association des Étudiants Hindous de France di Paris. Ia meyakini konsep "Greater India" bahwa apa yang disebut India tidak boleh hanya dilihat dalam teritori terbatas di subkontinen India, tetapi harus dalam kerangka Asia yang lebih luas (Bayly, 2004). Jauh sebelum Eropa datang, pengaruh kebudayaan dan politik India telah membentang luas dari Asia Tengah sampai ke Asia Tenggara.

Sedangkan Bui Quan Chiêu dan Duong Van Giao keduanya aktif di Indochinese Parti Constitutionnaliste, sebuah partai reformis moderat. Anggotanya tidak anti-Perancis. Partai ini mendesak Perancis untuk melakukan reformasi. Duiker (1989: 55) mencatat bahwa *concern* utama dari partai ini adalah memperluas representasi orang Vietnam dalam administrasi dan pemerintahan dan memberikan kesetaraan gaji, serta memberikan peran yang lebih luas bagi orang Vietnam dalam industri manufaktur dan perdagangan. Duong Van Giao pergi ke Perancis setelah Perang Dunia I untuk studi hukum. Tahun 1922 ia mendapatkan gelar doktor di institut yang baru berdiri, Institut de Criminologie de Paris. Ia menjadi advokat di Cour d' Appel de

Paris, pengadilan banding tertinggi di Paris dan membantu di *École des Langues Orientales*. Di luar itu ia aktif membantu berbagai organisasi semipolitik bagi orang-orang Indocina, seperti *Association Mutuelle des Indochinois*, kantor cabang *Parti Constitutionaliste*, dan *Association des Travailleurs Intellectuels d' Indochine* (Stutje, 2016: 99). Baik Bui Quan Chiêu dan Duong Van Giao beberapa kali berhubungan dengan aktivis yang lebih radikal, seperti Nguyen The Truyen dari *Parti Annamite de l' Indépendance* tetapi biasanya relasi mereka lebih ke lingkaran moderat.

AECO menjadi corong dari PI untuk berhubungan dengan para aktivis dan intelektual antikolonial Asia dan bertukar pandangan satu sama lain di antara mereka. Beberapa kali anggota AECO diundang oleh PI untuk memberikan kuliah atau berdiskusi. K.M. Panikkar datang ke pertemuan PI di Leiden bulan Juni 1926 untuk memberikan kuliah mengenai pentingnya “kesatuan Asia” (Stutje, 2016: 100). Ia menginap di tempat Hatta sekitar satu bulan untuk mempersiapkan naskah mengenai VOC di Malabar. Dua bulan kemudian Duong Van Giao gantian berkunjung ke Belanda atas permintaan dari PI untuk berbicara mengenai pergerakan nasional di Vietnam (Stutje, 2016: 100). Para anggota PI dan Giao saling bertukar pikiran mengenai gerakan nasionalis dan dampak dari kolonialisme di negaranya masing-masing. AECO juga menjadi penghubung bagi PI untuk memperluas propaganda mereka ke dunia internasional. Di bulan Februari 1926 departemen kebudayaan dari organisasi ini menginisiasi *Fête orientale artistique*, sebuah event kebudayaan di mana para peserta dari negara-negara Timur mempertunjukkan seni tari ataupun musik. Mononutu kemudian dengan ekspektasi tinggi mengirimkan surat ke perwakilan PI di Belanda untuk mengirimkan delegasi mahasiswa yang pandai menari untuk hadir di event ini.

PI menerima tawaran untuk tampil di pertunjukkan kebudayaan yang diadakan di salah satu hotel terbesar dan termewah di Paris, *Hotel Continental*, dengan menampilkan tari *Wireng Jawa*. Soepomo dan Wirjono, keduanya merupakan mahasiswa hukum di Leiden, didaulat untuk menjadi penari di acara itu (Hatta, 2011: 228). Pertunjukkan tarian *Wireng Jawa* ini sukses memukau penonton yang hadir. Namun bagi PI, pertunjukkan ini bukanlah sekedar penampilan kebudayaan, mereka menyadari bahwa pertunjukkan kebudayaan ini mengandung nilai politis. Menurut Mononutu, “prestise kesenian nasional kita bergantung padanya, bukan hanya tariannya, yang terpenting adalah nama Indonesia ... Tidakkah anda mengerti nilai propaganda, ketika Indonesia sebagai bangsa dapat memberi kesan yang baik, setara dengan negara-negara Timur yang paling terkenal” (Stutje, 2016: 101). Hatta sendiri dalam memoirnya senada dengan pendapat yang dikemukakan Mononutu. Ia mengatakan bahwa “pertunjukkan itu dipandang bagi PI sebagai pembuka jalan untuk kemudian melaksanakan propaganda politik, supaya “dunia luar” mengetahui adanya Indonesia yang menuntut Indonesia merdeka” (Hatta, 2011: 228).

Dalam bulan April 1926 penampilan kebudayaan yang diperlihatkan oleh PI diminta dipertunjukkan kembali ke dalam skala yang lebih kecil di *Société des Amis de l' Orient*, *Musée National des Arts Asiatiques-Guimet*, dan *Conservatoire de Paris* (Stutje, 2016: 102). Dalam pertunjukkan ini, tarian yang disajikan oleh PI diiringi oleh seperangkat gamelan yang berhasil dipinjam oleh Mononutu melalui kontak Marcelle Merlange. Dalam salah satu pertunjukkan, menurut Nalenan (1981: 62), di latar belakang panggung pertunjukannya PI dengan berani memasang bendera kebesaran mereka, yaitu gambar kerbau di tengah latar merah putih. Kerbau sendiri dalam lanskap pergerakan politik nasional di awal abad ke-20 adalah lambang nasionalisme Indonesia – di samping banteng. Lewat usaha yang dilakukan oleh PI ini menunjukkan bahwa organisasi ini menyadari pentingnya menempatkan kebudayaan dan seni ke dalam wilayah politik. Tidak hanya melalui demonstrasi, orasi, atau konferensi, pesan-pesan politik dapat

disampaikan, tapi kebudayaan dapat dijadikan alat politik yang efektif tanpa perlu dengan eksplisit atau konfrontatif menyampaikan pesan-pesan itu.

Nama Indonesia Mengudara

Pada 1926 integrasi jaringan internasional yang diupayakan oleh PI tampaknya berjalan mulus dikarenakan konferensi atau pertemuan internasional yang melibatkan berbagai organisasi ataupun partai muncul bergantian. Lima bulan setelah event kebudayaan oriental yang diadakan oleh AECO, PI mendapatkan kesempatan untuk hadir dalam Kongres Demokrasi Internasional untuk Perdamaian (Congrès Démocratique International pour la Paix) di Bierville, sebuah desa kecil 120 kilometer Barat laut Paris. Konferensi yang diadakan pada tanggal 14 Agustus sampai 23 Agustus 1926 ini merupakan event tahunan yang diorganisasi oleh Ligue de la Jeune-République atas dorongan utama dari gerakan demokrasi internasional di bawah pimpinan bekas anggota parlemen Perancis, Marc Sangnier (Hatta, 2011: 262).

Kehadiran dari PI di konferensi ini dimungkinkan berkat lobi yang dilakukan oleh para anggota AECO kepada Marc Sangnier. Pada awalnya Duong Van Giao mengetahui akan ada sebuah konferensi pasifis internasional di Bierville lewat kontak seorang temannya. Ia kemudian mengusulkan kepada anggota AECO lainnya, seperti Panikkar, Tung Mo, Mononutu, dan Topchubachev, untuk membentuk blok Asia dan mengangkat isu mengenai kolonialisme dan perdamaian di luar Eropa, terutama di Asia (Hatta, 2001: 317). Secara kolektif para anggota AECO sepakat dengan usul tersebut dan mengirimkan permintaan undangan langsung ke Sangnier. Usulan dari blok Asia ini disanggupi kemudian oleh Sangnier. Diterimanya permintaan dari blok Asia menandakan suatu fase baru dari konferensi demokrasi internasional sebab lima konferensi sebelumnya masalah perdamaian di Asia belum disinggung. Untuk pertama kalinya, menurut Hatta (2001: 317) dalam artikelnya di *Indonesia Merdeka* tahun 1926, “kaum pasifis Barat melihat Asia diwakili dalam kongres mereka dan untuk pertama kalinya mereka mendengar suara Asia, menyatakan dalam bahasa yang jelas bahwa tidak mungkin ada perdamaian abadi sepanjang bangsa-bangsa yang tertindas tidak bebas dari penindasan asing”.

Mengetahui usulan diterima, Mononutu segera memberitahu para anggota PI lainnya dalam suatu rapat anggota di Den Haag. Diputuskan dalam rapat bahwa Hatta sebagai ketua PI akan berangkat ke Bierville sebagai perwakilan dari PI dan pemuda Indonesia. Sayangnya Mononutu tidak ikut berangkat karena kekurangan biaya, di samping itu ia harus menghadiri kursus tentang hukum dan perhubungan internasional yang akan diadakan di Vredespaleis, Den Haag. Hatta berangkat ke Paris di bulan Juli dan diperkenalkan oleh Mononutu kepada Panikkar, Tung Mo, Duong Van Giao, dan Topchubachev. Dalam memoirnya, Hatta (2011: 263) mengaku bahwa mereka beberapa kali berkumpul di kafe mendiskusikan mengenai hal-hal yang akan dikemukakan nanti di Bierville. Panikkar gembira dengan hadirnya Hatta meskipun Mononutu tidak dapat hadir sebab selama ini Mononutu-lah yang kerap membantunya dalam menghubungkan dirinya dengan anggota AECO lain yang tidak dapat berbahasa Inggris dan hanya bisa berbahasa Perancis. Di dalam rapat, Hatta mengemukakan bahwa kehadirannya di Bierville mempunyai misi untuk memperkenalkan nama Indonesia kepada dunia internasional (Hatta, 2011: 263). Pada akhirnya disepakati bahwa mengingat terbatasnya waktu, delegasi Asia harus mencalonkan seorang di antara mereka sebagai wakil mereka yang berbicara atas nama Asia, sementara yang lain akan membatasi diri membicarakan pentingnya kemerdekaan negeri masing-masing bagi perdamaian dunia. Panikkar kemudian dicalonkan sebagai ketua mereka dan pidatonya diterbitkan oleh kelompok Asia sebagai sebuah manifesto (Hatta, 2001: 317).

Pada tanggal 14 Agustus 1926, Hatta bersama anggota blok Asia berangkat ke Bierville menggunakan kereta api. Mereka menginap dalam tenda-tenda yang telah disediakan oleh panitia konferensi. Mereka berlima terpisah dalam empat tenda. Hatta beruntung ditempatkan bersama Duong Van Giau dalam satu tenda di tempat tidur *krib* biasa yang lebarnya sekitar 75 cm. Tempat tidur mereka bersebelahan dalam jarak sekitar satu meter. Konferensi Bierville sendiri dihadiri oleh sekitar 5.000 orang dari 33 bangsa, yang mayoritasnya Eropa. Konferensi ini mendapatkan patronase dari para politisi tingkat tinggi Perancis dan bahkan dari Menteri Luar Negeri Perancis, Aristide Briand (Stutje, 2016: 103). Setiap delegasi di Bierville mendapat dua giliran bicara, pada masa pembukaan dan pada masa penutupan. Di samping itu ada pertemuan diskusi, membicarakan berbagai masalah yang dikemukakan dalam kongres itu.

Panikkar menyampaikan pernyataan *delegation Asiatique* di hari ketujuh konferensi. Ia mengatakan bahwa sampai saat ini perspektif orang-orang Eropa ketika berbicara perdamaian terlalu Eurosentrik. Dalam pikiran orang-orang Eropa dunia seolah-olah dibatasi oleh wilayah-wilayah kediaman ras Eropa (Hatta, 2001: 319). Padahal bila dunia ingin memiliki perdamaian abadi perdamaian harus tercipta tidak hanya meliputi beberapa bangsa tetapi meluas meliputi seluruh umat manusia. Delegasi Asia juga menentang penjajahan rakyat Asia yang mengancam perdamaian dunia,

“Persaingan bangsa-bangsa Eropa dan penjajahan rakyat Asia, dalam pendapat kami merupakan bahaya terbesar bagi perdamaian dunia. Di mana-mana di Afrika, di Asia, bangsa-bangsa Eropa bersaing antara sesamanya dalam perlombaan kotor penghisapan imperialistik terhadap bangsa-bangsa yang lebih lemah ... Penjajahan terhadap rakyat-rakyat India, Mesir, Indocina, penguasaan ekonomi-politik atas Cina merupakan ancaman terhadap perdamaian abadi. Perdamaian semu yang dibangun oleh pemerintahan asing dengan kekuatan bayonet-bayonetnya bukanlah perdamaian abadi sama sekali. Itu hanya perdamaian di bawah ancaman terorisme” (Hatta, 2001: 319).

Sementara itu, Hatta menyampaikan pidatonya sehari setelah pernyataan delegasi Asia. Pertama-tama, ia menyampaikan terima kasih kepada kongres karena telah mengizinkan seorang pemuda Indonesia berbicara atas nama Indonesia, yang mungkin baru mereka dengar pertama kali, untuk perjuangan Indonesia. Ia kemudian menyampaikan kepada konferensi bahwa Indonesia adalah nama dari sebuah gugusan kepulauan yang berpenduduk lebih dari 50 juta jiwa terletak di antara Asia dan Australia, dekat Filipina (Hatta, 2001: 322). Setelah pidato Hatta, orang-orang Belanda yang pada permulaan masih menyebut “Hindia Belanda” tidak menggunakan lagi kata itu, apalagi setelah mereka berdiskusi dengan Hatta tentang istilah itu. Di dalam pidatonya Hatta mengatakan bahwa “perdamaian dunia adalah masalah kemerdekaan bangsa-bangsa”. Barangsiapa yang menghendaki perdamaian dunia pastilah orang itu menginginkan kemerdekaan setiap bangsa, menurut Hatta. Pada pernyataannya tersebut Hatta ingin mengungkapkan kepada kaum demokrat Barat bahwa ada hubungan yang tidak dapat diputus antara dasar kemanusiaan dan perjuangan revolusioner untuk kemerdekaan bangsa (Hatta, 2011: 266). Lebih lanjut Hatta (2001: 325) menegaskan bahwa “cukup jelas bila kita ingin menyelamatkan perdamaian dunia, yang pertama-tama harus dilawan adalah rezim kolonial yang tidak adil”. Untuk memperjuangkan kemerdekaan itu maka peran para pemuda begitu krusial menurut Hatta. Para pemuda menyadari bahwa tanpa kemerdekaan tidak dapat tercapai pemikiran kemanusiaan yang paling mulia.

Jaringan Antikolonial Internasional dan Goyangunya Rezim Kolonial

Puncak dari aktivitas politik internasional dari kaum nasionalis PI adalah undangan untuk menghadiri Kongres Melawan Penindasan Kolonial dan Imperialisme (Congress Against Colonial Oppression and Imperialism) di Brussels, dari tanggal 10 sampai 15 Februari 1927. Pertemuan ini diorganisir oleh Willi Münzenberg, seorang komunis Jerman anggota Internationale Arbeiterhilfe (International Labor Aid) yang memiliki hubungan dengan Komintern (Petersson, 2013). Sejak awal tahun 1920-an, Komintern giat menyatukan gerakan antikolonialisme di dunia jajahan dengan gerakan komunisme Soviet untuk mendorong terciptanya revolusi kelas pekerja proletariat di seluruh dunia. Mengikuti kesuksesan kampanye antikolonial melawan agresi Inggris di Cina, intervensi militer Perancis di Suriah, Münzenberg dan para nasionalis kiri Cina eksil di Jerman membentuk sebuah “jaringan luas” organisasi komunis dan nonkomunis kiri, intelektual, berbagai organisasi antikolonial, dan komunitas migran Eropa (Stutje, 2015: 206). Kongres ini jelas membantu kesuksesan propaganda Soviet dan komunisme internasional, tetapi secara luas ia juga memfasilitasi kepentingan dan strategi dari berbagai delegasi antikolonial nonkomunis.

Kongres Melawan Penindasan Kolonial dihadiri oleh ratusan militan kiri, aktivis dan nasionalis antikolonial, dan pasifis dari seluruh dunia. PI sendiri mengirim lima orang perwakilannya ke Brussels, terdiri atas Moh. Hatta sebagai ketua delegasi, Nazir Pamontjak, Ahmad Soebardjo, Gatot Taroenomihardjo, dan Abdul Manaf – mewakili wakil seksi PI di Mesir – sebagai anggota delegasi (Hatta, 2011: 273). Selain itu, Semaun hadir juga mewakili Sarikat Rakyat. Tidak lama sebelum kongres ini diselenggarakan pemberontakan PKI terhadap pemerintah kolonial Belanda dan itu gagal. Hal ini mengakibatkan sekitar 13.000 orang komunis ditahan. Semaun sendiri dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda, ia sebelumnya telah bertemu dengan Hatta dan delegasi PI di Belanda.

Di Brussels, delegasi Indonesia ini bertemu dengan para aktivis dan nasionalis terkenal dari Asia dan Afrika untuk pertama kalinya. Di sinilah mereka bertatap muka dan membangun kontak dengan Jawaharlal Nehru (India) dari Indian National Congress; Lamine Senghor (Senegal) dari Comité de Défense de la Race Nègre; Hansin Liu (Cina) perwakilan dari Kuomintang, Hafiz Ramadhan Bey (Mesir) perwakilan dari Egyptian National Party, Messali Hadj (Aljazair) delegasi dari Étoile Nord-Africaine, dan James La Guma dan Josiah Gumede (Afrika Selatan) yang mewakili African National Congress (Petersson, 2014: 51-2; ISSH, League Against Imperialism Archives, No. 2). Sebagai ketua delegasi PI, Hatta diberi kehormatan menduduki Presidium Kongres (Hatta, 2011: 273). Semaun pun mendapatkan satu kursi presidium setelah kongres berjalan.

Dalam Kongres Melawan Penindasan Kolonial total terdapat 174 delegasi mewakili 134 organisasi, asosiasi, dan partai politik dari 34 negara yang berpartisipasi dalam kongres ini. Konferensi ini mendapatkan dukungan penuh dari peraih nobel Romain Rolland dan Albert Einstein, yang menjabat sebagai presiden kehormatan dari konferensi bersama dengan Soong Ching-Ling, janda dari pendiri Kuomintang yang terkemuka Sun Yat-Sen, dan teosofis Inggris dan pemimpin Labor Party, George Lansbury (ISSH, League Against Imperialism Archives, No. 2; Mišković, 2014: 2). Sebagai salah satu delegasi, Nehru (1936: 162) menulis dalam autobiografinya bahwa “di Brussels hadir perwakilan dari organisasi nasional Jawa, Indocina, Palestina, Suriah, Mesir, Arab dari Afrika Utara, dan Negro Afrika”. Sedangkan Hatta (2001: 328) menulis dalam *Indonesia Merdeka* bahwa kongres ini merupakan “peristiwa terpenting yang disaksikan dalam abad kita, itulah kongres pertama melawan tekanan imperialisme dan kolonial !”

Agenda Kongres Melawan Penindasan Kolonial yang utama berkaitan dengan perlawanan antikolonialisme adalah mengenai imperialisme Eropa dan konsekuensinya bagi negeri jajahan

(ISSH, League Against Imperialism Archives, No. 5). Di sini masing-masing delegasi diberikan kesempatan berbicara untuk mendiskusikan problem kolonialisme di negaranya masing-masing. Pamontjak berbicara mewakili delegasi Indonesia. Pertama-tama, ia menyampaikan geografi, sejarah, dan karakteristik ekonomi Indonesia (Stutje, 2015: 207). Kemudian, Pamontjak mengelaborasi sejarah kolonialisme Indonesia: eksploitasi ekonominya dan penderitaannya terhadap rakyat Indonesia. Ia mengatakan bahwa negara kolonial adalah hamba setia dari kepentingan kapitalisme internasional (Stutje, 2015: 207). Penindasan ganda dari kapitalisme dan kolonialisme inilah yang melahirkan perjuangan nasional untuk meraih kemerdekaan. Pemberontakan komunis 1926 menurut Pamontjak mesti dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari meningkatnya frustrasi sosial dan berkembangnya pergerakan antikolonial (Stutje, 2015: 207). Pidato Pamontjak diterima dengan baik oleh audiens dan seperti kebiasaan yang lainnya pembicara dapat mengajukan suatu resolusi mengekspresikan solidaritas dengan rakyat yang diperjuangkannya. Kongres akhirnya menyetujui resolusi bahwa mereka bersimpati kepada gerakan kemerdekaan Indonesia, memberikan kebebasan kepada rakyat Indonesia untuk bergerak, dan menuntut pemberian amnesti kepada para pemberontak (Sastroamidjojo, 1974: 50). Selain itu, kongres memutuskan untuk membentuk suatu komisi beranggotakan Nansen, Bernard Shaw, dan Barbusse, untuk pergi ke Jawa dan Sumatera menyelidiki benarkah pemberontakan komunis yang baru terjadi merupakan hasutan komunis atau karena kesengsaraan sosial yang diderita oleh rakyat (Hatta, 2011: 275).

Sekembalinya dari Brussels para anggota PI merasa puas dengan performa yang mereka tunjukkan di sana. Hatta menuliskannya dalam sepenggal artikel yang dimuat di *Indonesia Merdeka* bahwa “masalah nasional kita banyak dibicarakan dan dipelajari dalam kongres, suatu hal yang tidak dilakukan terhadap negeri-negeri lain. Lebih dari kapanpun, Indonesia sekarang terkenal dan dikenal oleh masyarakat dunia. Bersama wakil bangsa-bangsa lain yang terjajah dan tertindas kita telah mengembangkan ikatan persahabatan yang akan tetap besar nilainya sampai jauh di masa depan” (Poeze, 2008: 208). Bagi delegasi PI, keterlibatan mereka di Brussels jelas bermanfaat sekali untuk melaksanakan kepentingan mereka: meluaskan jaringan ke gerakan antikolonial internasional dan menyebarkan propaganda kemerdekaan Indonesia. Mereka, para delegasi Indonesia, berkenalan pertama kali dengan pemimpin pergerakan rakyat dari Asia dan Afrika, seperti Nehru, Senghor, Ramadhan Bey, dan Messali Hadj. Inilah momen di mana mereka tidak hanya saling berkenalan, tetapi juga saling mempelajari pergerakan masing-masing negara satu sama lain, dan yang paling penting membina hubungan yang akan bermanfaat di masa depan. Seperti yang diungkapkan Nehru dalam pengakuannya bahwa Kongres Melawan Penindasan Kolonial “membantu saya untuk memahami beberapa masalah kolonial dan negara yang belum merdeka” (Nehru, 1936: 163). Dari pengetahuan yang didapatkan selama kongres, Nehru mengatakan bahwa “kontak antara berbagai orang akan menuntun kepada pemahaman yang lebih baik tentang masalah dan kesulitan satu sama lain dan terikat untuk menghasilkan kerjasama lebih erat yang akan membawa kesuksesan lebih dekat untuk semua” (Kimche, 1973: 5).

Di akhir, para peserta kongres sepakat untuk mendirikan sebuah liga bernama Liga Melawan Imperialisme dan untuk Kemerdekaan Nasional (League Against Imperialism and for National Independence). Penamaan organisasi yang menggunakan kata liga merupakan hal yang disengaja sebagai serangan langsung terhadap Liga Bangsa-Bangsa yang tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghentikan kolonialisme. Hatta dan Semaun duduk di dalam Komite Eksekutif Liga bersama Nehru, Senghor, dan Messali Hadj. Tugas Komite Eksekutif Liga adalah mewakili Liga dalam konferensi-konferensi, menentukan agenda, dan menyebarkan propaganda (Stutje, 2013: 167). Sebagai anggota komite, Hatta dan Semaun harus membangun kontak dan hadir dalam

pertemuan komite yang mereka adakan beberapa bulan sekali, bergantian di kota-kota Eropa. Selain Hatta, anggota PI lainnya Soebardjo bekerja di kantor Liga di Berlin cukup lama di tahun 1927. Keikutsertaan PI di Kongres Melawan Penindasan Kolonial dan bergabungnya PI mendirikan Liga Melawan Imperialisme dianggap sebagai manuver yang membahayakan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda khawatir dengan propaganda kemerdekaan Indonesia oleh PI yang semakin meluas secara internasional dan juga terhadap hubungan antara organisasi itu dengan gerakan komunisme Indonesia dan internasional.

Pemerintah Belanda mengambil tindakan represif terhadap aktivitas PI yang dituduh sebagai subversif dan menghasut untuk menentang Kerajaan Belanda. Di bulan Juni 1927 rumah para anggota PI di Leiden dan Den Haag digeledah oleh kepolisian Belanda. Polisi Belanda mengobrak-abrik rumah, kamar demi kamar, lemari demi lemari, untuk mencari dokumen perjanjian rahasia Hatta-Semaun (Sastroamidjojo, 1974: 53). Ketika terjadi penggrebakan, Hatta sedang berada di Swiss mendampingi Soemadi Sastrodihardjo, mahasiswa Delft anggota PI, yang sakit keras. Pada tanggal 23 September 1927 empat orang anggota PI ditangkap oleh pemerintah Belanda, yaitu Hatta, Pamontjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdoelmadjid Djojoahningrat. Hatta ditangkap setelah baru beberapa hari kembali berpidato dari Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté (Liga Wanita Internasional untuk Perdamaian dan Kemerdekaan) di Gland, Swiss. Ditahannya para anggota PI menyebabkan kegiatan dengan Liga berhenti dan majalah *Indonesia Merdeka* berhenti terbit. Di dalam penahanannya Hatta menyiapkan pledoinya yang fenomenal berjudul *Indonesia Vrij* (Indonesia Merdeka). Pembelaannya itu tidak dibacakan seluruhnya dalam sidang pembelaan, namun dibukukan dan nantinya berpengaruh kuat bagi pergerakan kemerdekaan di tanah air. Setelah mengikuti sidang silih berganti, pada tanggal 22 Maret 1928 diumumkan hasil akhir keputusan mahkamah. Keputusannya adalah para anggota PI dibebaskan dari segala tuduhan.

Ketika para anggota PI ini keluar dari tahanan, situasi Liga sedang tidak kondusif. Terjadi perselisihan yang semakin kuat antara kelompok komunis dan nonkomunis (nasionalis, sosialis kiri, dan antimiliteris). Hatta melihat bahwa Liga makin lama makin menjadi “alat Moskow” bukan lagi ikatan kerjasama antara kaum nasionalis, komunis, dan sosialis yang luas dan setara (Poeze, 2008: 213). Dalam pertemuan pimpinan Liga di Amsterdam di bulan Maret 1929, Sekretaris Jenderal Münzenberg menceritakan kepada Edo Fimmen dan Hatta bahwa ia mendapatkan tekanan dari Moskow untuk melonggarkan hubungan kaum komunis dengan orang-orang sosialis kiri (Hatta, 2011: 301). Garis kebijakan internal Soviet telah berubah haluan disebabkan oleh konflik memperebutkan massa kaum buruh dengan kaum sosialis dan juga konflik yang muncul antara Kuomintang dengan Soviet. Di dalam Liga orang-orang nonkomunis dihadapkan dalam kenyataan: mengikuti garis komunis atau keluar. Upaya untuk mempertahankan bentuk Liga yang unik kandas karena tidak tercipta dialog yang setara dan timbal balik. Pada akhirnya, Liga ditinggalkan oleh orang-orang nonkomunis yang dicap sebagai kaum borjuis reformis dan hanyalah menjadi organisasi mantel komunis (Poeze, 2008: 214). Meskipun Liga bertahan hanya dalam waktu singkat, Kongres Melawan Penindasan Kolonial merupakan episode penting bagi pergerakan antikelonial Indonesia karena melalui momen itu ide-ide kemerdekaan Indonesia berhasil disebarluaskan dan solidaritas antikelonial berhasil dibangun melalui jaringan antiimperialisme global Asia-Afrika.

Kesimpulan

Meskipun periode kegiatan politik PI begitu singkat di Paris, namun hasil yang ditimbulkannya begitu signifikan bagi meluasnya kontak terhadap gerakan antikolonial lain dan penyebarluasan propaganda kemerdekaan Indonesia di level internasional. Berangkat dari hubungan dalam lingkaran kecil AECO, PI dapat menangkap momen semakin intensifnya pembangunan jaringan antara gerakan antikolonial dan antiimperialisme Asia dan Afrika di Eropa pada masa *interwar* yang dipengaruhi oleh kegagalan retorika Wilsonian dan Liga Bangsa-Bangsa, dorongan komunisme internasional, nasionalisme antikolonial, dan kesamaan pengalaman sejarah dan tujuan politik. Partisipasi PI di dalam konferensi internasional, seperti Kongres Demokrasi Internasional untuk Perdamaian dan Kongres Melawan Penindasan Kolonial, berpengaruh dalam mengangkat nama Indonesia dalam jaringan antikolonial internasional dan membangun ikatan yang lebih dalam dengan para tokoh pergerakan yang berasal dari Asia dan Afrika. Meskipun dampak politik langsung keterlibatan PI dalam gerakan antikolonialisme internasional mengakselerasi kemerdekaan Indonesia masih diperdebatkan, namun yang jelas keterlibatan internasional mereka dianggap sebagai ancaman oleh Kerajaan Belanda. Yang lebih penting lagi dalam kacamata poskolonial adalah pembangunan jaringan internasional antara Indonesia dan Asia-Afrika ini berdampak jauh di dalam merekatkan solidaritas hubungan di antara mereka yang menjadi basis dari terbentuknya Dunia Ketiga (Utama, 2017b). Nasionalisme antiimperial yang nantinya bertransformasi menjadi Dunia Ketiga bukanlah transplantasi Eropa ataupun reaksi yang natural dan berakar yang ditunen di rumah sendiri melawan campur tangan kolonial. Namun, ia dibentuk melalui kontak, jaringan, dan konektivitas yang para nasionalis dari Dunia Ketiga impikan tentang tatanan dunia pascaimperial (Goebel, 2015: 3).

Meskipun propaganda internasional yang dilakukan oleh PI untuk kemerdekaan tanah air, kontak dan jaringan yang dibangun oleh para elite nasionalis Indonesia ini ditempa di pusat imperial Eropa bukannya di koloni. Melalui aktivitas internasional PI kita dapat melihat bahwa kemunculan ide nasionalisme menginspirasi pembentukan jaringan baru melampaui wilayah Belanda dan Indonesia (Stutje, 2013: 153). Selama ini historiografi pergerakan Indonesia di awal abad ke-20 terlalu fokus dalam menganalisis perkembangan gerakan nasionalis yang muncul di dalam negeri. Padahal, internasionalisme antikolonial pergerakan Indonesia di awal abad ke-20 begitu luar biasa membentang terhubung dengan gerakan nasionalis global Asia dan Afrika, komunisme internasional, dan di antara diaspora politik orang Indonesia itu sendiri. Dengan menempatkan sejarah pergerakan antikolonial Indonesia dalam konteks internasional ataupun transnasional maka diharapkan studi sejarah pergerakan antikolonial Indonesia menemukan informasi dan pengetahuan baru yang dapat melengkapi historiografi sebelumnya.

Daftar Pustaka

Arsip

International Institute of Social History (IISH), League Against Imperialism Archives, No. 2, 'List of Organizations and Delegates Attending the Congress Against Colonial Oppression and Imperialism', 10 February 1927.

IISH, League Against Imperialism Archives, No. 5, 'Agenda of the Congress Against Colonial Oppression and Imperialism', 10 February 1927.

Buku, Artikel, dan Jurnal

Aissaoui, Rabah (2009). *Immigration and National Identity: North African Political Movements in Colonial and Postcolonial France*. London: Tauris Academic Studies.

Bayly, Susan (2004). "Imagining 'Greater India': French and Indian Visions of Colonialism in the Indic Mode", *Modern Asian Studies*, 38, 3: 703-744.

Blumberger, J. Th. P. (1931). *De Nationalistische Beweging in Nerderlansch-Indië*. Haarlem: Tjeenk Willink.

Boehmer, Elleke (2002). *Empire, the National, and the Postcolonial, 1890-1920: Resistance in Interaction*. New York: Oxford University Press.

Boittin, Jennifer Anne. (2010). *Colonial Metropolis: The Urban Grounds of Anti-Imperialism and Feminism in Interwar Paris*. Lincoln & London: University of Nebraska Press.

Bose, Sugata (2006). *A Hundred Horizons: The Indian Ocean in the Age of Global Empire*. Cambridge: Harvard University Press.

Brückenhaus, Daniel (1989). *Policing Transnational Protest: Liberal Imperialism and the Surveillance of Anticolonialist in Europe*. New York: Oxford University

Duiker, William J. (1989) *Historical Dictionary of Vietnam*. Metuchen: Scarecrow Press.

Edwards, Brent Hayes. (2003) "The Shadow of Shadows", *Position: East Asia Cultures Critique*, 11, 1 : 11-49.

Elson, R.E. (2009) *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan*. Jakarta: Serambi.

Fakih, Farabi (2012). "Conservative Corporatist: Nationalist Thoughts of Aristocrats. The Ideas of Soetatmo Soeriokoesoemo and Noto Soeroto", *Bijdragen tot de Taal- en Volkenkunde*, 168, 4: 420-444.

Gedenkboek Indonesische Vereeniging 1908-1923. (1923)'s-Gravenhage: Indonesische Vereeniging.

Goebel, Michael. (2015) *Anti-Imperial Metropolis: Interwar Paris and the Seeds of Third World Nationalism*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hatta, Moh. "Kongres Brussels Menentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial serta Propaganda Kita di Luar Negeri", dalam Moh. Hatta. *Karya Lengkap Bung Hatta: Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial* (buku 3). Jakarta: LP3ES, 2001.

Hatta, Moh. (2001). "Propaganda Luar Negeri Kita", dalam Moh. Hatta. *Karya Lengkap Bung Hatta: Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial* (buku 3). Jakarta: LP3ES.

_____. (2011) *Untuk Negeriku: Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi* (vol. 1). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- _____ (2001). *Karya Lengkap Bung Hatta: Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial* (buku 3). Jakarta: LP3ES.
- Ingleson, John. (1983). *Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*. Jakarta: LP3ES.
- _____ (1993). *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kahin, George McTurnan. (2013). *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kimche, David. (1973). *The Afro-Asian Movement: Ideology and Foreign Policy of the Third World*. Jerusalem: Israel University Press.
- Manela, Erez. (2007) *The Wilsonian Moment: Self-Determination and the International Origins of Anticolonial Nationalism*. New York: Oxford University Press.
- Mišković, Nataša (2014). "Introduction", dalam Nataša Mišković, Harald-Fischer Tiné dan Nadda Boškowska (eds.). *The Non-Aligned Movement and the Cold War: Delhi-Bandung-Belgrade*. London & New York: Routledge.
- Nalenan, R. (1981). *Arnold Mononutu: Potret Seorang Patriot*. Jakarta: Gunung Agung.
- Nehru, Jawaharlal (1936). *An Autobiography*. London: The Bodley Head.
- Petersson, Fredrik (2014). "Hub of the Anti-Imperialist Movement", *Interventions: International Journal of Postcolonial Studies* 16, 1: 49-71.
- Petersson, Fredrik. (2013). *Willi Müzenberg, The League Against Imperialism and the Comintern, 1925-1933* (vol. 1). Lewiston: Queenston Press.
- Poeze, Harry. (2008). *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*. Jakarta: Gramedia.
- Prashad, Vijay. (2007). *The Darker Nations: A People's History of the Third World*. New York: The New Press.
- Sastroamidjojo, Ali (1974). *Tongak-Tongak di Perjalananku*. Jakarta: Kinta.
- Stolte, Carolien dan Harald Fischer-Tiné, (2012). "Imagining Asia in India: Nationalism and Internationalism (ca. 1905-1940), *Comparative Studies in Society and History*, 54, 1: 65-92.
- Stutje, Klaas. (2013). "Indonesian Identities Abroad: International Engagement of Colonial Students in Netherlands 1908-1931", *BMGN – Low Countries Historical Review*, 128-1: 151-172.
- _____ (2015). "To Maintain Independent Course: Interwar Indonesian Nationalism and International Communism on a Dutch-European Stage", *Dutch Crossing: Journal of Low Countries*, 39, 3: 204-220.
- _____ (2016). *Behind the Banner of Unity: Nationalism and Anticolonialism among Indonesian Students in Europe, 1917-1931*. Disertasi. Amsterdam: University of Amsterdam, 2016.
- Utama, Wildan Sena (2014). "Imajinasi dan Aksi Anti-Kolonialisme dan Nasionalisme Asia Tenggara", *Jurnal Kajian Wilayah*, 5, 2: 166-183.
- _____ "Membangun Jaringan Antikolonial di Eropa", *Jurnal Ruang*, 7 Oktober 2017a. <https://jurnalruang.com/read/1506322963-membangun-jaringan-antikolonial-di-eropa>.
- _____. *Konferensi Asia-Afrika 1955: Asal Usul Intelektual dan Warisannya bagi Gerakan Global Antiimperialisme*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2017b.
- Van Dijk, Cees. (2007). *The Netherlands Indies and the Great War, 1914-1918*. Leiden: KITLV Press.
- Van Niel, Robert. (1984). *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.